

 <p style="text-align: center;">SOP POLITEKNIK PELAYARAN SUMATERA BARAT</p>	Nomor SOP	002/SOP/POLTEKPEL SUMBAR-SBK/06/2022
	Tgl. Disahkan	28/02/2016
	Tgl. Revisi	23/06/2022
	Tgl. Diberlakukan	23/06/2022
	Disahkan Oleh	<p style="text-align: center;">DIREKTUR POLITEKNIK PELAYARAN SUMATERA BARAT</p>  <p style="text-align: center;">CAPT. WISNU RISIANTO, M.M. Pembina (IV/b) 19710202 199808 1 001</p>
PENERIMAAN DANA PNBP ISO 9001:2015		
Dasar Hukum :		Cara Mengatasi :
<ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Pemerintah 15 Tahun 2016 Tentang Jenis dan Tarif atau Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Perhubungan; 2. Peraturan Menteri Perhubungan RI No. 108 Tahun 2021 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Pelayaran Sumatera Barat; 3. Peraturan Menteri Perhubungan RI No. 122 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan; 4. Peraturan Menteri Perhubungan RI No. 67 Tahun 2020 tentang Statuta Politeknik Pelayaran Sumatera Barat; 5. Peraturan Menteri Perhubungan RI No. 50 Tahun 2017 Tentang pedoman penyusunan peta proses bisnis dan standar operasional prosedur di lingkungan kementerian perhubungan; 6. Peraturan Menteri Perhubungan RI PM 140 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 70 Tahun 2013 tentang Pendidikan dan Pelatihan, Sertifikasi serta Dinas Jaga Laut; 7. Peraturan Menteri Perhubungan No. 99 Tahun 2011 tentang Kode Etik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Perhubungan; 8. Keputusan Menteri Perhubungan RI No. 225 Tahun 2019 tentang Peta Jabatan dan Uraian Jenis Kegiatan di Politeknik Pelayaran Sumatera Barat; 9. Peraturan Kepala Badan Pengembangan SDMP No. PK.07/BPSDMP-2016; 10. Peraturan Kepala Badan Pengembangan SDMP No. SK.2287/BPSDMP-2013; 11. PMK. No : 190/ PMK.05/ 2012 tentang tata cara pembayaran; 12. KM.66 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyusunan Laporan Keuangan dan Pertanggungjawaban Anggaran Kantor/ Satuan Kerja di Lingkungan Kementerian Perhubungan; 13. STCW No. 1978 dan Amandemennya; 14. ISO 9001:2015, Klausul 7.5.3. Pengendalian Informasi Terdokumentasi, Klausul 8.5. Pengendalian Produksi dan Jasa. 		<p>Dilakukan kegiatan Penerimaan Dana PNBP sesuai dengan SOP dan Peraturan Perundangan yang berlaku.</p> <div style="text-align: center; border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 10px auto;"> <p>DOKUMEN INDUK</p> </div>
Keterkaitan :		Peralatan :
<ol style="list-style-type: none"> 1. Pedoman Mutu Poltekpel Sumbar; 2. SOP Pengendalian Informasi Terdokumentasi. 		<ol style="list-style-type: none"> 1. Komputer; 2. Printer; 3. Lembar Kerja.
Peringatan :		
<p>Apabila SOP Penerimaan Dana PNBP tidak dilaksanakan maka penerapan SOP di lapangan mengalami kendala dan tidak sesuai dengan peraturan perundangan yang</p>		

berlaku.	
----------	--

SOP PENERIMAAN DANA PNB									
NO.	URAIAN JENIS KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			KET.
		PETUGAS LOKET PENDAFTARAN	BANK	PENERIMAAN	AKUNTANSI	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	
1	Mengeluarkan slip pendaftaran yang dibutuhkan oleh pengguna jasa					Dokumen persyaratan diklat; Tarif layanan	5 menit	Slip Setoran	
2	Melakukan pembayaran pada Bank yang ditunjuk					-	-	Slip setoran yang telah divalidasi	
3	Melakukan verifikasi slip setoran dari pengguna jasa yang sudah divalidasi oleh Bank dan Mencatat di buku kas masuk/ bank					Slip setoran yang telah divalidasi, Checklist hasil verifikasi	10 menit	RTH (Register Transaksi Harian)	
4	Membuat catatan pembukuan dan membandingkan dokumen dengan rekening koran dari bank (membuat rekonsiliasi)					Rekening Koran; Laporan Bank Harian	5 menit	Berikut Acara Rekonsiliasi Bank	
5	Membuat laporan pertanggungjawaban/ LPJ dan disampaikan kepada bagian akuntansi untuk dicocokkan dengan laporan arus kas bulanan					Rekening Koran; Laporan Bank Harian; Berita Acara Rekonsiliasi Bank	10 menit	LPJ	

RIWAYAT PERUBAHAN SOP PENERIMAAN DANA PNEP

NO.	ISI PERUBAHAN	TANGGAL BERLAKU
01	<ul style="list-style-type: none"> - Perubahan Peraturan Menteri Perhubungan RI PM 70 Tahun 2013 menjadi Peraturan Menteri Perhubungan RI PM 140 Tahun 2016 serta Peraturan Kepala Badan Pengembangan SDMP No. PK. 01 / BPSDMP-2013 Menjadi Peraturan Kepala Badan Pengembangan SDMP No. PK. 07 / BPSDMP-2016 - Penggabungan SOP Pengendalian Dokumen dan SOP Pegendalian Arsip menjadi SOP Pengendalian Informasi Terdokumentasi 	14/11/2016
02	<ul style="list-style-type: none"> - Perubahan LOGO - Perubahan Nama Organisasi - Perubahan Struktural 	19/03/2018
03	Perubahan fromat SOP sesuai PM.No.50 Tahun 2017 Tentang pedoman penyusunan peta proses bisnis dan standar operasional prosedur di lingkungan kementerian perhubungan	7/4/2019
04	<ul style="list-style-type: none"> - Perubahan Dasar Hukum Peraturan Menteri Perhubungan RI Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Pelayaran Sumatera Barat menjadi Peraturan Menteri Perhubungan RI Nomor 49 Tahun 2019 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Pelayaran Sumatera Barat; - Menambahkan Keputusan Menteri Perhubungan RI No. 225 Tahun 2019 tentang Peta Jabatan dan Uraian Jenis Kegiatan di Politeknik Pelayaran Sumatera Barat. 	18/6/2020
05	<ul style="list-style-type: none"> - Perubahan Peraturan Menteri Perhubungan RI No.49 Tahun 2019 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Pelayaran Sumatera Barat menjadi Peraturan Menteri Perhubungan RI No. 108 Tahun 2021 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Pelayaran Sumatera Barat - Perubahan Menteri Perhubungan RI No.100 Tahun 2018 Tentang Statuta Politeknik Pelayaran Sumatera Barat menjadi Peraturan Menteri Perhubungan RI No. 67 Tahun 2020 tentang Statuta Politeknik Pelayaran Sumatera Barat - Perubahan tanda tangan Pengesahan SOP sesuai SK Nomor 2763 tahun 2021 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dari Dan Dalam Jabatan Di Lingkungan Kementerian Perhubungan 	23/06/2022